

Kalbar Berkomitmen Tetap Akuntabel Kelola Keuangan Negara



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Pada Era reformasi dan demokrasi, kesadaran masyarakat untuk menuntut agar keuangan negara dikelola secara akuntabel dan transparan dan bebas dari penyelewengan dan penyalahgunaan.

"Pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan serta menghasilkan output dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pembangunan, pengelola keuangan harus dikelola orang-orang yang berkompeten, profesional disertai dengan pedoman yang jelas sesuai dengan asas-asas tata kelola dengan baik," ungkap Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH usai mengikuti Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2017 di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Rakernas yang dibuka Presiden RI Ir. Joko Widodo tersebut juga dihadiri sejumlah kepala daerah lainnya seluruh Indonesia dan pimpinan kementerian/lembaga.

Tampak juga sejumlah Menteri Kabinet Kerja antara lain Menteri Keuangan Srida Mulyani Indrawati, Menkes Nila Moeloek, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menristek Dikti M Nasir, Wamenkeu Mardiasmo, Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang

Sumber Berita :

1. <http://pontianak.tribunnews.com/2017/09/14/kalbar-berkomitmen-tetap-akuntabel-kelola-keuangan-negara>
2. <http://beritakalimantan.com/komitmen-bersama-mengelola-keuangan-negara/>

Catatan Berita :

Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut pasal 16, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.